



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

MINGGU, 20 JANUARI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Rp 1,1 M Dana BK Belum Dikembalikan

BENGKULU, BE - Pengembalian kerugian negara dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bengkulu belum ada penambahan. Dari total kerugian negara Rp 1,5 miliar, baru Rp 400 juta saja yang sudah dikembalikan. Artinya masih ada kerugian negara Rp 1,1 miliar belum dikembalikan.

Empat orang terdakwa Ikh-sanul Arif, Emiyati, M Sofyan dan Yulian Firdaus yang saat ini masih menjalani sidang belum ada yang mengembalikan kerugian negara. Bila tak juga mengembalikan KN mereka terancam mendapat tuntutan hukum yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut dibenarkan Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan SH MH.

"Belum ada terdakwa yang mengembalikan, yang sudah itu honorer dan ASN DPKAD yang menerima tunjangan dana BK," jelas Kajari.

Padahal pengembalian kerugian negara penting agar bisa dijadikan pertimbangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan keringanan tuntutan. Jika tidak ada pengembalian atau itikad baik mengembalikan, JPU siap memberikan tuntutan berat sesuai undang-undang berlaku.

"Harapannya harus ada upaya pengembalian dari para terdakwa. Jika ada pengembalian tentu akan menjadi dasar pertimbangan JPU untuk memberikan keringanan hukuman," imbuh Kajari.

Sekedar mengingatkan, pemberian tunjangan dana BK kepada pegawai di DP-

PKAD Kota Bengkulu menyalahi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015. Jika sesuai dengan perwal, seharusnya tunjangan dana BK dibayarkan pada bulan Agustus 2015. Tetapi tunjangan dana BK malah dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Februari 2015. Sementara sisa pembayaran pada bulan berikutnya belum ada kejelasan. Yang memiliki peran besar dalam dugaan korupsi tersebut diantaranya Kadis, Bendahara pengeluaran dan pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan serta pencairan. Setelah melakukan penyelidikan cukup panjang Kejari akhirnya menetapkan Empat orang tersangka bulan Oktober 2018 lalu. Saat ini kasus korupsi tersebut masih dalam tahap persidangan. (167)